



Alih Fungsi Lahan Marak Pemkab Terkesan Kejar Pembangunan Fisik

Negara (Bali Post) -

Adanya alih fungsi lahan yang semakin marak khususnya di kawasan hulu Kecamatan Jembrana, membuat khawatir para petani dan sejumlah pihak. Pemkab dituding tutup mata terkait banyaknya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di daerah resapan tersebut dikhawatirkan akan membuat Kota Jembrana tenggelam.

Sejumlah petani, Rabu (29/4) di Subak Tegalantang yang berada di sebelah utara kantor Bupati mengatakan alih fungsi yang dilakukan investor besar sangat banyak. Menurut mereka puluhan hektar tanah diratakan, untuk dijadikan kaplingan yang rencananya diperuntukkan untuk perumahan. Namun sayang perda tata ruang baru dibahas dan masih di provinsi, namun izin alih fungsi lahan untuk daerah tersebut sudah dikeluarkan.

Ketut Suartana seorang petani mengatakan lahan pertanian di subak tersebut seperempatnya sudah dikuasai pengembang. Subak Tegalantang yang dulunya memiliki luas 50 hektar kini hanya tersisa 15 hektar. Bahkan dirinya menilai hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pemerintah dalam menjaga kondisi lahan

pertanian dan petani itu sendiri.

Sementara itu, Ketua LSM Front Kebangkitan Masyarakat Jembrana (FKMJ) I Nengah Ridja mengatakan, lahan pertanian di Jembrana kini semakin terkikis. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya rekomendasi alih fungsi lahan yang diterbitkan Pemkab sehingga terkesan pembangunan daerah lebih bertumpu ke sektor pembangunan fisik seperti perumahan.

Pemkab semestinya lebih serius mengurus sektor pertanian, bukannya hanya melakukan pembangunan taman dan infrastruktur lainnya. Pihaknya khawatir jika dibiarkan terus petani akan gulung tikar beralih menjadi buruh, dan dampak terburuknya Jembrana mengalami krisis ketahanan pangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) I Gusti Mer-

thadana dikonfirmasi mengatakan, memang sebelumnya di daerah utara Kantor Bupati yang dijadikan kota satelit merupakan kawasan civic center dan daerah resapan.

Namun, lantaran banyak masyarakat yang membangun di daerah tersebut sehingga kawasan civic center tersebut dicabut. Namun, pencabutan tersebut katanya hanya dilakukan terhadap kawasan di sebelah barat jalan saja. Namun, yang di sebelah timur jalan masih berfungsi sebagai jalur hijau. Sementara kawasan di utara saluran udara tegangan tinggi (Sutet) memang dulu merupakan kawasan resapan air. Namun, kini sudah diubah menjadi kawasan pemukiman sesuai dengan Perda No. 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (kmb)

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 14



Dampak Kenaikan Retribusi Pariwisata

Bangli Terancam

Ditinggalkan Wisatawan

Bangli (Bali Post) -

Kenaikan tarif retribusi pariwisata yang dilakukan Pemkab Bangli melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 200 persen sejak awal tahun 2015 ini dinilai belum berimbang pada peningkatan fasilitas objek pariwisata. Kondisi ini bisa mengancam Kabupaten Bangli sebagai destinasi pariwisata dunia dan lambat laun akan ditinggalkan wisatawan, terutama wisatawan asing.

Wakil Ketua Organisasi Asita Bali Putu Winastra belum lama ini mengungkapkan kenaikan tarif retribusi yang terbilang tinggi ini sebaiknya diimbangi dengan peningkatan fasilitas kawasan pariwisata. Namun, hingga saat ini upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kawasan pariwisata belum terlihat secara nyata. "Sampai sekarang belum terlihat secara signifikan upaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata," ujarnya.

Apabila keadaan pariwisata tetap terkesan jalan di tempat seperti saat ini, keinginan wisatawan untuk berkunjung akan semakin berkurang. Bahkan, kemungkinan terburuk dikatakan bisa saja terjadi, yakni wisatawan akan meninggalkan Bangli dan memilih objek wisata lain yang lebih memberikan kepuasan. "Kalau terus seperti ini, kemungkinan wisatawan untuk beralih ke objek wisata lain bisa terjadi. Apalagi daerah pariwisata di Bali sangat banyak, dan itu pun tidak kalah," terangnya.

Winastra juga menilai, kecenderungan objek wisata di Bangli saat ini hanya dijadikan tempat persinggahan saat makan siang saja. Hal ini sebagai dampak dari minimnya fasilitas yang tersedia, sehingga sulit menjadikan daerah ini sebagai objek wisata akhir dari sekian objek wisata yang ada di Bali. "Kalau fasilitas mendukung, Bangli ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata akhir, yaitu wisatawan bisa menginap. Sekarang kan lebih banyak sekadar makan siang saja, habis itu langsung pergi," katanya.

Ditambahkan juga, hal kecil yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, yakni kebersihan kawasan pariwisata. Pasalnya, di beberapa titik masih dihiasi sampah dan hal itu sangat mengganggu kenyamanan wisatawan saat berkunjung. "Hal kecil saja, seperti sampah hingga saat ini belum mendapatkan perhatian yang serius. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap kunjungan," pungkasnya. (kmb45)

Edisi : Kamisi, 30 April 2015

Hal : 9



Dugaan "Mark-Up" di Undiksha

Kejati Kembali Periksa Empat Saksi

Denpasar (Bali Post) -

Pihak penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terus menggenjot pemeriksaan saksi atas dugaan *mark-up* pengadaan tanah untuk Gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK), Gelanggang Olah Raga (GOR) dan asrama mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Rabu (29/4) kemarin, tim kembali memeriksa empat orang saksi. Mereka adalah I.B. Ema Harta, Ketut Suanjaya, I Gusti Ngurah Semadi Putra dan Made Arnawa.

Mereka datang guna menjalani pemeriksaan di lantai dua Kejati Bali. "Saksi adalah anggota pengadaan," tandas Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, siang kemarin.

Dia menjelaskan, pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat berkas serta mempertajam data yang sudah dimiliki terkait dengan dugaan *mark-up* pengadaan tanah seluas sekitar 15 hektar itu. Saat disinggung apakah kasus ini melibatkan pejabat pusat, Ashari tidak mau berandai-andai dan menyebutkan bahwa perkara ini sedang didalami penyidik kejaksaan. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi di Undiksha mulai nyerempet Pemkab Buleleng. Itu terkuak dalam pemeriksaan saksi selama dua hari sebelumnya, yang dilakukan penyidik Akmal Kodrat, Gede Arthana, Wayan Suardi dan Subekan. Mereka yang dijadikan saksi adalah Rektor Undiksha Dr. I Nyoman Jampel dan mantan Rektor Prof. I Nyoman Suidiana serta Prof. I Ketut Seken. Selasa (28/4) besoknya, tim kembali memeriksa dua profesor. Mereka adalah Prof. Wayan Rai dan Prof Suma. "Mereka adalah anggota tim pengadaan," tandas Ashari Kurniawan.

Selain rektor, ada empat profesor yang diperiksa dalam perkara yang telah menetapkan IWS dan NM sebagai tersangka. Prof. Rai menjelaskan bahwa dia ditanya soal pengadaan lahan. "Saya katakan, bahwa saya diperintah pak rektor dan ditunjuk sebagai tim. Kedua, pengadaan tanah diserahkan ke Pemda (Buleleng)," jelasnya.

Dia pun mengatakan bahwa pengadaan tanah itu kemudian melalui SK Bupati. "Ini ada SK Bupati," katanya. Soal penentuan harga, itu melalui tim independen. "Harganya berapa, transaksinya di mana, lokasinya di mana, saya tidak tahu," jelasnya. (kmb37)

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 3



Kebocoran Air Lampau Nasional



Bali Post/sos

Yuliawan Askara

Bangli (Bali Post) -

Kebocoran jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bangli cukup tinggi. Sampai bulan ke empat tahun 2015 ini, terjadi kebocoran sebanyak 29 persen. Angka ini melampaui standar nasional yang hanya 20 persen. Tingginya persentase kebocoran ini disinyalir akibat dari usia jaringan yang sudah tua.

**Direktur PDAM
Wayan Gede Yuliawan**

Askara, Rabu (29/4) kemarin mengungkapkan, tingkat kebocoran jaringan ini sesungguhnya sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya yang sempat mencapai di atas 30 persen. Kendati demikian, melihat standar nasional, jaringan PDAM ini dikatakan masih banyak memerlukan pembenahan. "Persentase kebocoran memang sudah mengalami penurunan, tapi angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan standar nasional," ujarnya. Dikatakan beberapa kebocoran ini juga diakibatkan oleh bencana alam, seperti tanah longsor. Dijelaskan, dari empat kecamatan yang ada, kebocoran paling banyak terjadi di Kecamatan Bangli yang berada di sekitar Jalan Brigjen Ngurah Rai dan Jalan Nusantara. "Kerusakan paling banyak berada di Kecamatan Bangli. Kalau yang lain tidak begitu," ungkapnya.

Dikatakan pihaknya sudah melakukan perbaikan sejak awal bulan April ini. Namun sayang, petugas sangat sulit mendeteksi lokasi kebocoran, lantaran beberapa jaringan tertanam sangat dalam. "Perbaikan secara rutin sudah kami lakukan. Hanya saja terkendala saat mendeteksi kebocoran," terangnya. Ia mengakui saat ini masih kekurangan sumber mata air. Pasalnya, dari sekian luas wilayah, PDAM hanya memasok air dari 13 sumber mata air dan jumlah ini dirasa masih kurang. Oleh Karena itu, PDAM berencana mencari lagi 5 sumber air, agar pemenuhan kebutuhan ke konsumen dapat dilakukan secara maksimal. "Kami rencanakan ada penambahan sumber mata air agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen," tambahnya. Berdasarkan catatan, sebanyak 25 persen daerah belum tersentuh air bersih dan paling banyak berada di daerah Kintamani. Untuk beberapa daerah di Kintamani, pelayanan terkendala topografi wilayah yang berbukit sehingga menyulitkan saat penarikan air dari tempat yang lebih rendah. (kmb45)

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 9



Pemkab Lelang Barang Rongsokan

Anggarkan Rp 4,5 Miliar

untuk Mobil Pejabat

Bangli (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Bangli akan melelang aset barang yang telah rusak atau rongsokan. Pelelangan rencananya dilakukan setelah Bagian Umum, Aset dan Perlengkapan selesai melakukan pendataan dan menginventarisir seluruh barang yang masih layak maupun yang sudah tidak layak pakai. Adanya rencana pelelangan tersebut disampaikan Kepala Bagian Umum Aset dan Perlengkapan Made Mahindra Putra, Rabu (29/4) kemarin.

Dikatakan, adapun jenis barang yang rencananya akan dilelang nanti di antaranya berupa kursi, meja, almari serta sejumlah barang kantor lainnya yang kondisinya sudah tidak layak pakai alias rusak. "Ada banyak barang-barang yang sudah rusak, hampir di seluruh SKPD," terangnya.

Sejauh ini pihaknya sudah meminta datanya ke SKPD dan sebagian besar datanya sudah masuk ke Bagian Umum.

Selain untuk menambah

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor barang yang dihapuskan, pelelangan aset yang kondisinya telah rusak itu juga dilakukan agar tidak memenuhi banyak tempat. Terlebih selama ini rata-rata kantor SKPD jarang ada yang memiliki gudang untuk menyimpan barang-barang rusak.

Sementara itu, terkait rencana lelang kendaraan dinas, Mahindra Putra belum bisa memberi banyak keterangan. Dikatakan lelang kendaraan

dinas bisa dilakukan kalau anggaran pengadaannya sudah ada. Mantan Kabag Humas dan Protokol ini mengungkapkan, sebenarnya saat ini Pemkab Bangli masih memiliki sejumlah kendaraan dinas yang usianya cukup tua. Bahkan kendaraan tersebut masih ada yang dioperasikan oleh beberapa pejabat. Seperti kendaraan carry keluaran tahun 1995 yang saat ini masih digunakan oleh beberapa kepala bagian.

Terkait hal tersebut, pihaknya

sudah memiliki rencana untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas yang baru. Selain diperuntukan untuk Kabag, rencananya pengadaan kendaraan dinas yang baru juga untuk beberapa pejabat seperti asisten, staf ahli bupati, dan pimpinan unit kerja lainnya. "Kurang lebih 15 unit mobil," ujarnya. Untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut pihaknya merancang sekitar Rp 4,5 miliar. "Ini semua demi pelayanan publik," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 5



Dewan Minta
Pemkab Serius
Fasilitasi Izin Galian C

Bangli (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Bangli diminta serius memfasilitasi keinginan para pemilik dan sopir galian C Kintamani terkait proses perizinan galian C yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Pemkab diharapkan tidak sekadar berwacana. Pemkab diharapkan bisa segera mencari solusi pekerjaan pengganti jika nantinya keberadaan galian C di Kintamani benar-benar ditutup total. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Ngakan Kutha Parwata saat ditemui, Rabu (29/4) kemarin.

Menurutnya, sebagai fasilitator Pemkab Bangli juga harus bisa melakukan negosiasi agar keinginan masyarakat penambang pasir dengan keinginan Pemerintah Provinsi sama-sama bisa mendapat titik temu dan tidak merugikan satu pihak. "Saya inginnya agar ada nego antara keinginan masyarakat dan pemerintah. Sehingga bisa *win-win solution* dalam persoalan tersebut," terangnya. *Win-win solution* dianggapnya penting mengingat ada banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada galian C di Kintamani. Kutha Parwata sangat berharap Pemerintah Provinsi yang kini memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan izin tambang bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan menutup galian C di Kintamani. Penutupan sebaiknya dilakukan secara bertahap.

Adapun langkah awal yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan membatasi pengoperasian alat berat. Termasuk membatasi lalu-lalang truk yang bertonase tinggi, yang kerap mengganggu kenyamanan lalu lintas di kawasan tersebut. Pemerintah melalui Dinas Pertanian juga harus mulai bergerak aktif melakukan pendekatan ke masyarakat. Dengan harapan agar warga yang dulunya bergelut di penambangan pasir perlahan bisa beralih ke bidang pertanian. (kmb40)

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 10



Pasca-Asisten II Ditahan

Pemkab Siapkan Pelaksana Tugas

Amlapura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyiapkan pelaksana tugas (plt.) pascaditahannya Asisten II Setda Karangasem Ida Bagus Made Oka, usai pelimpahan tahap II dari penyidik Tipikor Polda Bali kepada Kejari Karangasem. Sejumlah nama setingkat eselon II sudah disiapkan. Nama-nama itu selanjutnya akan dibahas bersama dalam Baperjakat (Badan Pertimbangan dan Kepangkatan) Karangasem.

Sekda Karangasem I Gede Adnya Muliadi, ditemui Rabu (29/4) kemarin, mengatakan pihaknya saat ini sedang menunggu surat penahanan tersangka dari pihak Kejari Karangasem. Ia juga meminta BKD langsung melakukan kajian, agar kekosongan tidak terjadi terlalu lama. Setelah melewati pembahasan di Baperjakat, nama-nama tersebut kemudian akan disodorkan kepada Bupati Karangasem Wayan Geredeg. Sayangnya, dia belum bisa menyebut berapa dan siapa saja nama-nama itu. Ia hanya menjelaskan pengantinya tentu setingkat eselon II, bisa saja dari kepala dinas, kepala badan, staf ahli atau bisa juga asisten merangkap. "Saya harus terima dulu bukti tertulis

bahwa dia ditahan, baru proses penggodokan untuk mengisi pelaksana tugas bisa dilakukan," katanya.

Disinggung mengenai upaya memberikan bantuan hukum, mengingat yang menjadi tersangka dan ditahan adalah pejabat aktif, Adnya Muliadi menegaskan pemerintah daerah tidak akan menurunkan tim hukum. Jika yang digugat adalah lembaga pemerintah daerah, baru tim hukum dari pemerintah daerah bisa dikerahkan. "Ini yang digugat adalah oknum, bukan lembaga pemerintahan," jelasnya. Sementara, melalui lembaga Korpri juga sulit memberikan pendampingan hukum terhadap tersangka. Sebab, terbentur masalah anggaran. Iuran Korpri dinilai terlalu kecil dan selalu habis untuk kegiatan HUT Korpri setiap tahun dan kegiatan suka duka anggota Korpri lainnya.

Ia sempat berkonsultasi untuk memanfaatkan lembaga Korpri, apakah bisa pembiayaannya melalui pemerintah daerah ke Korpri. Sebab, selama ini mereka bekerja untuk pemerintah daerah, dan status tersangka belum tentu bersalah. Mereka juga berhak mendapat pendampingan, sebagaimana diatur dalam Kepres

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 15



yang mengatur AD/ART Korpri. Namun, ia belum berani memaknai langkah ini. Sebab, harus dikonsultasikan lebih jauh dengan pengurus Korpri pusat. Di sisi lain, ia memperoleh petunjuk bahwa kasus ini adalah masalah pribadi, sehingga tidak mungkin dibantu dengan memanfaatkan anggaran dari pemerintah daerah.

Dengan situasi ini, baik pemerintah daerah maupun Korpri dipastikan tidak bisa memberikan pendampingan hukum terhadap tersangka. Adnya Muliadi mengaku hanya bisa memberikan dukungan

moril bersama rekan-rekan pejabat lain yang tidak ikut terjerat dalam kasus ini. Disisi lain, usai Ida Bagus Made Oka ditahan, Selasa (28/4) sore lalu, pihak keluarga tersangka menjenguknya ke LP Karangasem, usai mendapatkan surat rekomendasi atau izin dari Kejari Karangasem. Istri dan anak-anaknya tampak membawakan beberapa pakaian dan kasur lipat untuk digunakan tersangka saat bermalam di balik jeruji besi.

Sebelumnya diberitakan, tersangka Ida Bagus Made Oka langsung dijebloskan ke LP

Karangasem, Rabu (28/4) lalu. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi air bersih itu ditahan setelah menjalani proses pelimpahan tahap II dari penyidik Tipikor Denpasar kepada Kejari Karangasem. Kasus ini sendiri diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar. Ida Bagus Made Oka mengikuti jejak mantan Kepala Dinas PU Karangasem I Wayan Arnawa yang bahkan lebih dulu divonis satu tahun enam bulan ditambah denda Rp 100 juta di Pengadilan Negeri Denpasar, 5 Maret 2015 lalu. (kmb31)



Ida Bagus Made Oka (kiri) terjerat kasus pipanisasi

Bali Post/bud

Edisi : keameri, 30 April 2015

Hal : 15



Soal Proyek Pengurukan Pantai Melasti

Akan Dilakukan Kajian, Harus Ada Izin

Mangupura (Bali Post) -

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung hingga kini belum menentukan sikap terkait keberadaan proyek pembangunan anjungan di Pantai Melasti, Ungasan, Kuta Selatan. Padahal, proyek pengurukan tersebut belum mengantongi izin. Belum berizinya proyek tersebut telah diakui Bendesa Adat Ungasan I Ketut Marcin didampingi Perbekel Desa Ungasan Wayan Sugita Putra saat memenuhi panggilan Satpol PP Badung, Rabu (22/4) lalu.

Kasatpol PP Badung I Ketut Martha saat dimintai konfirmasi, Rabu (29/4) kemarin, mengatakan pihaknya belum mengambil langkah terkait adanya proyek miliaran rupiah tersebut. Rencananya, Satpol PP bersama instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) akan mengecek keberadaan proyek tersebut pekan depan. "Kami akan turun bersama Dinas Perikanan dan BLH, dan sudah dijadwalkan minggu depan. Apabila nanti dalam pelaksanaan pembangunan menurut kajian Perikanan menganggap perlu ada izin, maka dia (masyarakat) harus mohon izin," tegasnya.

Terkait pernyataan Dewan Badung yang memberikan lampu hijau pembangunan anjungan tersebut, Martha menegaskan, harus ada kajian terlebih dahulu sebelum proyek tersebut dilanjutkan. "Kami dari eksekutif sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) akan turun ke lapangan. Setelah turun, baru ada kajian teknis dari Perikanan, BLH maupun BPPT. Kalau Dewan mengatakan lanjut, mungkin

kajiannya lain," ungkapnya.

Pakar hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. juga menegaskan, sebagai negara hukum maka segala bentuk pembangunan harus memiliki legalitas yang jelas. Persoalan munculnya biaya dalam proses perizinan, bisa dibijaksanai mengacu pada peruntukannya. "Kalau dari konsep tata ruang, harus ada legalitas. Kalau tidak, semua pembangunan akan liar nantinya. Izin itu untuk mengatur tata ruang, persoalan nanti dia tidak dikenakan beban biaya dalam proses perizinan, itu nomor dua," jelasnya.

Selain mematuhi ketentuan hukum, dikatakan Wairocana, adanya perizinan merupakan upaya menghindari adanya sengketa di kemudian hari. "Legalitas tetap harus ada, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Contohnya, kasus tanah Unud yang dituntut oleh cucunya. Padahal, semuanya sudah valid dan sah. Jadi, tidak bisa seperti ngurus keluarga di bawah tangan saja," tuturnya.

Seperti diberitakan, usai melakukan pemanggilan Bendesa dan Perbekel Ungasan, Sat-

pol PP bersama instansi terkait rencananya segera turun ke lapangan meninjau proyek tersebut. Namun berselang sepekan, Satpol PP bersama tim belum juga turun ke lapangan. Sementara Bendesa Adat Ungasan Ketut Marcin menegaskan jika pengurukan pantai untuk anjungan itu tidak terpikirkan dalam gambaran besar penataan Pantai Melasti. Ide pembangunan anjungan muncul dari hasil keputusan *paruman* desa demi memperlancar pelaksanaan prosesi upacara keagamaan, seperti *pakelem* kambing dan sapi. Sebab, jika tidak dibuatkan anjungan, masyarakat yang ada di 15 banjar adat di sana kesulitan dalam melaksanakan prosesi adat. "Fungsinya, bila saat air laut surut, anjungan itu bisa jadi akses jalan untuk menenggelamkan *sekah*. Karena, tidak mungkin menaruhnya di darat," pungkasnya, beberapa waktu lalu. (kmb27)



Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 2



Terkait Pagar Hotel di Canggu Sidak Dewan Badung Dinilai Telat

Mangupura (Bali Post) -

Ibarat tabuh telah usai baru menari, tudingan itulah yang di-alamatkan pada Dewan di Badung. Bagaimana tidak, wakil rakyat di Komisi II dan III DPRD Badung baru turun ke lokasi tempat pembangunan *panyengker* (pagar) Hotel Canggu Intercontinental di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Rabu (29/4) kemarin. Reaksi ini dinilai telat, karena sebelumnya tim gabungan yang terdiri dari sejumlah SKPD terkait di Pemkab Badung telah turun ke lapangan dan meminta pihak investor mengurus izin.

Bahkan, kedatangan sejumlah SKPD yang dipimpin Wakil Bupati Badung Made Sudiana saat itu telah menghasilkan keputusan. Di antaranya, menyarankan investor melengkapi perizinan. Mengingat, dari data yang ada, pihak pengusaha sudah memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tahun 2012 dan sudah melakukan sosialisasi pada tahun itu juga. Setelah mengajukan izin UKL/UPL ini, mereka diharuskan melanjutkan izin ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Sumber Air (SDA) Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk memohon kajian pembuatan revertmen. Bahkan, Bupati Badung A.A. Gde Agung sudah menyatakan, jika melanggar maka harus ditindak tegas.

Namun sidak Dewan kali ini, diakui Ketua Komisi II Nyoman Dirga Yusa, akan diikuti langkah lanjutan yakni mengundang pihak terkait mulai dari investor, camat, perbekel hingga masyarakat yang terlibat di dalamnya. "Kami akan panggil investor, camat, perbekel dan masyarakat yang melakukan perjanjian," ucap Dirga Yusa bersama Ketua Komisi III Nyoman Satria.

Pemanggilan tersebut, kata Dirga Yusa, sebagai bentuk kontrol dewan dalam mencari tahu duduk persoalan yang terjadi sehingga tidak menjadi konsumsi publik yang berkepanjangan yang dapat mengundang pertanyaan. "Kalau dibiarkan (tembok pagar - red) jorok sekali jadinya. Kalau mau buat pengaman, kalau bisa seperti di Pantai Matahari Terbit (Sanur)," ucapnya di sela-sela sidak bersama anggota komisi di antaranya A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, I Wayan Sandra, I Gde Aryantha.

Kalau tanah yang dipagari merupakan tanah pribadi, lanjut Dirga Yusa, dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009-2029, jelas mengatur apa yang disebut sempadan pantai. Pada Pasal 50 ayat 4 huruf (a) disebutkan, "daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat". Pihaknya akan mengamankan seluruh aktivitas warga setempat, terlebih pagar beton tersebut menghalangi aktivitas keagamaan seperti melasti maupun aktivitas lainnya yang dilakukan di laut. "Kami *concern* pada kepentingan masyarakat dan kepentingan masyarakat wajib menjadi prioritas," tekannya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria mengatakan, keikutsertaannya dalam sidak tersebut tidak lebih dari kroscek terkait PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Apakah bangunan telah sesuai dengan PPB atau tidak, termasuk salinan data perizinan yang diperoleh dari BPPT Badung. "Kami masih pelajari data salinan izin dari BPPT," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 2